**Dari Kerajaan Kanjuruhan Hingga Majapahit**

**(Dinamika Politik dan Pemerintahan Dalam Sejarah)**

Oleh : Dr. Wisnu,M.Hum.

Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FISH Unesa

Apabila dicermati dengan menggunakan sumber-sumber sejarah secara saksama, dinamika politik dan pemerintahan dalam perjalanan sejarah Indonesia mengalami proses dan perkembangan panjang. Secara historis pemerintahan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur mengalami proses naik turun, baik dalam hal tinggi-rendahnya status politik maupun silih bergantinya pemerintahan. Perkembangan itu tergantung kepada bagaimana kemampuan manajerial Pemerintah Pusat kerajaan dalam mengkonsolidasikan kekuasaannya terhadap pemerintah di suatu daerah. Dinamika politik dan pemerintahan tersebut setidak-tidaknya telah melekat atau menjadi wacana perkembangan sejarah Jawa Timur sejak abad IX seperti diberitakan oleh prasasti *Swadharma* (898),[[1]](#footnote-1) *Nagarakrtagama* (1365),[[2]](#footnote-2) *Serat Babad Momana* (1636),[[3]](#footnote-3) *Serat* *Pustaka* *Rajapuwara* (1733),[[4]](#footnote-4) Perjanjian Mataram-VOC (1733), [[5]](#footnote-5) dan Pemerintah Hindia Belanda (1928).[[6]](#footnote-6)

Lebih dari itu, di Jawa Timur sebagaimana diberitakan oleh prasasti Dinoyo tahun 760 M (abad VIII) juga telah muncul tingkat pemerintahan tertentu dalam hubungannya dengan pemerintahan pusat. Kerajaan Kanjuruhan yang disebut-sebut di dalam prasasti Dinoyo dalam hubungannya dengan kerajaan Mataram kuna, apakah merupakan bagian wilayah kerajaan tersebut (propinsi) atau sebagai pusatnya [[7]](#footnote-7); atau sejenis satuan pemerintah daerah setingkat (*watak*) yang kemudian menyatakan diri sebagai raja, seperti Mulawarman dari Kutai. Status tertentu pemerintahan yang pernah muncul di Jawa Timur antara lain dapat dilacak pada sumber-sumber : prasasti Kinewu (907),[[8]](#footnote-8) Jonggrang (929),[[9]](#footnote-9) Anjuk Ladang (937),[[10]](#footnote-10) Janggala-Panjalu (1042),[[11]](#footnote-11) *Nagarakrtagama* (1365),[[12]](#footnote-12) *Bang Wetan* (*Mancanagara* *Wetan* dan Pesisir *Wetan,* 1636, 1733),[[13]](#footnote-13) *The History of Java* oleh Raffles (1817),[[14]](#footnote-14) sumber-sumber masa kolonial, Ketetapan PPKI tentang pembentukan Propinsi dan dokumen perundang-undangan RI lainnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Berdasarkan sumber-sumber epigrafis, baik terbentuknya satuan wilayah Jawa Timur maupun penetapan statusnya sebagai daerah yang berpemerintahan setingkat propinsi, sebenarnya telah muncul dan paling tidak dapat dilacak pada abad XIII, yaitu sejak zaman Singasari dan mengalami kemantapannya pada masa Majapahit. Pada kurun waktu 1300-1400 Majapahit mengalami puncak perkembangan pranata politik dengan penanda utama antara lain : (1) struktur birokrasi terpola dengan jelas, (2) penekanan tugas birokrasi pada jabatan militer yang ekspansif, (3) pemerintahannya terpusat dan telah mampu melakukan intervensi hingga ke tingkat desa, (4) mantapnya struktur pemerintahan di bawah pemerintahan pusat yaitu ; tingkat *nagara* (propinsi) dengan cakupan wilayah meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, dan (mungkin Bali) yang belum pernah tercapai pada periode sebelumnya, dan (6) peranan genealogi sebagai faktor menonjol dalam sistem suksesi.[[15]](#footnote-15) Pola struktur pemerintahan tersebut hingga kini tetap menjadi dasar struktur pemerintahan di Indonesia yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Daerah, dan Pemerintah Desa. Pemerintah Daerah di Jawa dipimpin oleh para penguasa lokal, terutama Bupati dan di bawah koordinasi para *Bathara* (Gubernur). Penguasa bawahan tersebut menerima kekuasaan dari Raja, sebaliknya setiap tahunnya mereka berkewajiban melakukan upacara *sheba* (menghadap) ke istana untuk menyatakan kesetiaan dan memberikan upeti. Dalam struktur pemerintahan Majapahit para penguasa daerah itu berfungsi sebagai penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa.[[16]](#footnote-16)

Untuk mendapatkan gambaran perkembangan struktur pemerintahan dan wilayah di Jawa Timur hingga bentuknya yang sekarang (2005), secara sepintas akan dipaparkan perkembangan struktur pemerintahan dan wilayah dari zaman Mataram Kuno (760-929), Medang (937-1080), Kediri (1080-1222), Singasari (1222-1292), Majapahit (1294-1527), Demak-Pajang (1575), Mataram (Islam-1575-1755), VOC (1743-1799), Hindia Belanda (1800-1942), masa pendudukan Jepang (1942-1945), dan masa Indonesia Merdeka.

**A. Masa Kekuasaan Wangsa Isana (937-1222)**

Keberadaan Kerajaan Mataram kuna menurut prasasti Canggal (732 M), di bawah pimpinan Raja Sanjaya. Berdasarkan tebaran epigrafis peninggalan dan arkeologisnya kekuasaan Sanjaya nampaknya berpusat di sekitar Kedu. Sekitar empat puluh lima tahun kemudian (778) kekuasaan Dinasti Sanjaya terdesak oleh pendatang baru, yaitu Dinasti Syailendra. Dinasti Syailendra berkuasa di Jawa Tengah hingga 856 M, tatkala kekuatan Dinasti Syailendra di bawah pimpinan Balaputra Dewa dapat diusir oleh Rakai Pikatan.[[17]](#footnote-17) Berdasarkan bukti-bukti arkeologis dan epigrafis dari candi-candi : Plaosan, Sewu dan Prambanan memberikan petunjuk bahwa struktur pemerintahan Mataram kuna disusun secara konsentris. Pemerintahannya secara hirarkhis terdiri dari pemerintahan pusat (kerajaan), pemerintahan daerah (*watek*), dan pemerintahan desa (*wanua*).[[18]](#footnote-18)

Pada pertengahan pertama abad X terjadi perkembangan politik di Jawa. Perkembangan yang terjadi adalah Sri Maharaja Rake Hino Mpu Shendok Sri Isanawikramadarmattungga yang lebih dikenal dengan nama PuShendok (929-947), raja keturunan Dinasti Sanjaya terakhir di Jawa Tengah pada tahun 937 M. memindahkan pusat kerajaannya ke Jawa Timur. Berdasarkan prasasti yang dikeluarkan oleh Pu Shendok sebagian besar bertebaran di wilayah Jawa Timur, seperti di Blitar, Turen, Gempol (Pasuruan), dan Kediri dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah kekuasaannya telah bergeser dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Apalagi pada abad ke-10 telah terjadi perkembangan dunia yaitu dengan tercapainya masa keemasan Kekhalifahan Abasiyah 750-1258 (Dunia Arab), Kerajaan Sriwijaya 670-1377 (Asia Tenggara), Dinasti Tang (Asia Timur-Cina), telah melibatkan Indonesia dalam jaringan perdagangan dunia yang makin intensif dengan komoditi primadona : rempah-rempah.

Menghadapi perkembangan perdagangan internasional yang baru itu Pu Shendok menanggapinya secara kreatif. Peluang itu oleh Pu Shendok dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi niaga Nusantara yang semula bersifat agraris ke arah perdagangan maritim. Pu Shendok dengan beraninya melakukan perubahan terhadap tatanan yang telah mapan selama berabad-abad, yaitu memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman Jawa Tengah ke Jawa Timur, khususnya di muara atau delta Brantas. Tujuannya agar Jawa dapat berpartisipasi dalam perdagangan maritim secara langsung. Dalam tindakannya pada masa transisi tersebut Pu Shendok melakukan konsolsidasi kekuasaan dan pemerintahannya dalam suatu sistem dan struktur yang mantap. Hal ini terbukti semakin menonjol dan berperannya pejabat tinggi pelaksana keputusan raja, yaitu *Mahamantri* *Katrini* terdiri dari : *Mahamantri i Hino, Mahamantri i Halu* dan *Mahamantri i Sirikan.[[19]](#footnote-19)* Dari gelar yang digunakan Maharaja Shendok sendiri tampaknya sebelum naik tahta juga menjabat *Mahamantri i Hino.[[20]](#footnote-20)*

Selanjutnya Shendok membangun *wangsa* atau dinastinya yang di dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai Wangsa Isana. Keturunan Wangsa Isana berkuasa di Jawa Timur tidak kurang dari 300 tahun (937-1222). Ternyata tindakan dan langkah berani Pu Shendok dengan gebrakannya untuk memanfaatkan perkembangan global terpaksa menghadapi berbagai kesulitan bahkan juga harus melalui pertempuran yang menentukan di Anjuk Ladang (937) hingga akhirnya ia berhasil memindahkan pusat kerajaannya ke Jawa Timur.[[21]](#footnote-21) Akan tetapi, selama masa pemerintahannya di Jawa Timur (937-947) ternyata Pu Shendok belum mampu melakukan perubahan yang berarti dalam struktur pemerintahannya. Selama masa pemerintahannya Pu Shendok masih melanjutkan susunan yang berasal dari pemerintahan di Jawa Tengah, yang terdiri dari pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Maharaja dan keluarganya, pemerintahan *watek* di bawah para *hadyan, raka, samget* atau *pamget,* dan pemerintahan tingkat desa atau *wanua* dipimpin oleh *rama*.[[22]](#footnote-22)

Sepeninggal Pu Shendok (947 M.), berdasarkan prasasti Calcutta (1042) terdapat nama-nama raja seperti : Isanattunggawijaya, Lokapala dan Makutawangsawardhana yang secara genealogis dihubungkan dengan Pu Shendok. Akan tetapi nama-nama tersebut tidak diketahui lebih jauh tentang peran mereka di dalam pemerintahan. Tokoh lainnya yang sangat menonjol ialah Darmawangsa. Darmawangsa di samping dihubungkan dengan perkawinan Airlangga, juga dikenal karena pada masa pemerintahannya telah dilakukan penggubahan bagian-bagian tertentu ephos Mahabarata ke dalam bahasa Jawa kuna.[[23]](#footnote-23) Darmawangsa meneruskan cita-cita Pu Shendok dalam pengembangan perdagangan maritim di Nusantara yang saat itu didominasi oleh Sriwijaya. Darmawangsa memiliki pandangan tajam bahwa usaha memajukan perdagangan maritim Jawa baru akan berkembang bila mampu bersaing dengan Sriwijaya. Untuk mewujudkan gagasan tersebut berdasarkan sumber-sumber Cina Darmawangsa pada tahun 992 melancarkan serangan ke Sriwijaya, meskipun tidak berhasil. Akan tetapi belum ada sumber yang memberitakan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh Darmawangsa guna menyempurnakan pemerintahannya di Jawa Timur

Airlangga melanjutkan pemerintahan Darmawangsa di Kahuripan (1019-1042). Sebagai penerus tahta Darmawangsa, ia menghabiskan sebagian besar masa pemerintahannya (1019-1037) untuk berjuang mengintegrasikan kembali sisa-sisa kerajaan mertuanya, Darmawangsa, yang telah terpecah belah akibat ekspansi Sriwijaya atau Melayu ke Jawa Timur. Setelah perjuangannya berhasil, Airlangga sebagai ksatria menetapi *dharma-*nya tentang kesempurnaan hidup sesuai dengan ajaran Hindu *catur ashrama.* Ajaran itu terdiri dari tahapan-tahapan: *brahmacarin, grhasta, wanaprastha,* dan *samyasin.* Untuk menepati *dharma* tersebut Airlangga pada tahun 1042 turun dari tahta selanjutnya menjadi petapa di hutan sampai ia meninggal pada 1049. Oleh karena masa stabilisasi pemerintahan Airlangga juga sangat singkat hingga ia tidak sempat mengembangkan sistem pemerintahan dari masa sebelumnya.[[24]](#footnote-24)

Pada abad XI-XIII (1049-1222) berlangsung kekuasaan keturunan Dinasti Isana di Kediri. Masa Kediri merupakan periode stabilisasi dan kemakmuran hingga Kerajaan itu mampu menghasilkan karya-karya intelektual dalam kesusasteraan Jawa kuna yang bermutu tinggi, seperti kakawin-kakawin : *Ramayana, Bharatayudha, Smaradahana, Gatutkacasraya,* dan lain-lain.[[25]](#footnote-25) Kekuasaan kerajaan Kediri juga telah meliputi Kepulauan Indonesia bagian Timur. Pada masa Kediri dalam struktur pemerintahannya juga muncul istilah *thani, wisaya* dan *bhumi*  seperti terungkap di berbagai prasasti. Misalnyapada prasasti Jaring (1181) ”... *pingsorakurug*-*anak* *thani* *tka* *ri* *wisaya* *punpunan* *tan* *kna* *rin* *pakrapakri* *pakalangkang*-*pakalingking* ...”. [[26]](#footnote-26) Artinya ; ” ... diturunkan pakaian bagi anak *thani* hingga *wisaya* yang menjadi bagiannya, dan tidak dikenakan pungutan *pakra-pakri* dan *pakalangkang-pakalingking”.*

Dalam prasasti Hantang (1135) juga disebutkan hubungan antara *thani* dan *wisaya* sebagai berikut :” ... *sambandha* *ikang* *wisaya* *ri* *hantang* *rwawlas* *thani* *makadi* *dalem* *thani*...”. Artinya : ”... yang menjadi sebabnya adalah *wisaya* di Hantang yang meliputi dua belas *thani* dengan dalem *thani* yang terutama ...” Pemberitaan prasasti Hantang itu menunjukkan bahwa dalam suatu *wisaya* terdapat 12 *thani,* sedang pada prasasti Padlegan (116) ada 5 *thani*, dan pada prasasti Lwadan (1205) meliputi 8 *thani*. Pada zaman Kadiri juga muncul pejabat yangdisebut *haji* atau *lurah* diduga merupakan pejabat wilayah pada tingkat *wisaya.* Satuan wilayah *wisaya* menggantikan *watek* dariabad-abad sebelumnya.[[27]](#footnote-27) Selanjutnya pada masa itu juga muncul istilah *bhumi,* antara lain pada prasasti-prasasti : Ceker (1185), Kemulan (1194). Istilah *bhumi* dapat disejajarkan dengan istilah *nagara* yang muncul pada masa berikutnya Singasari, yaitu prasasti Mulamalurung (1255). Dalam hal ini bila *bhumi* mengacu kepada ibu kota, sedangkan *nagara* adalah sebutan bagi satuan wilayah secara geografis atau fisik yang dipimpin oleh seorang haji. Misalnya : *nagara* *lamajang*, *nagara* *daha*, *nagara* *madura*, *nagara* *hring*, dan lain-lain. Dalam hubungan antara *nagara* dan *bhumi* di prasasti Mulamalurung antara lain disebutkan : *Sri* *Krtanagara* *i* *nagara* *Daha* di bhumi Kadiri. Sri Jayakatwang bersama permaisuri di *nagara* Glang-glang di *bhumi* Wurawan ; dan seterusnya.

Berdasarkan sumber-sumber prasasti di atas dapat disimpulkan bahwa struktur pemerintahan dari zaman Kediri terdiri dari : *thani* (desa), *wisaya/lurah/haji* (kabupaten), dan *bhumi* (pusat).[[28]](#footnote-28)

**B. Masa Kerajaan Singasari (1222-1292)**

Pada masa Singhasari (1222-1292) terjadi perkembangan baru dalam struktur pemerintahan/ketatanegaraan di Jawa Timur. Apabila pada periode sebelumnya baik dari abad VIII-X (Mataram Kuna) di Jawa Tengah hingga abad XIII (masa akhir Kadiri –Singhasari) para Raja dalam mengimplementasikan kebijakannya ke bawah atau kepada rakyat melalui institusi para penguasa di tingkat *watek* yang kemudian menjadi *wisaya* pada zaman Kediri. Berdasarkan pemberitaan prasasti Mula-Malurung (1255) pada periode Singhasari muncul institusi baru yaitu *nagara* sebagai satuan wilayah pemerintahan yang posisinya berada di atas *watek/wisaya,* dan di bawah Raja. Dalam prasasti Mula-Malurung disebutkan bahwa satuan wilayah pemerintahan itu dipimpin oleh sanak keluarga Raja, yaitu Raja Seminingrat atau Wisnuwardhana (1248-1268) sebagai berikut.

1...........................................................di *nagara* Madura;

2. Nararya Kirana (anak) sebagai *juru* di Lamajang.

3. Sri Krtanagara (anak)di *nagara* Dahadi *bhumi* Kadiri.

4. Sri Jayakatwang (menantu) bersama permaisurinya *Turuk Bali* (anak) di

*nagara* Glang*-*glangdi *bhumi* Wurawan.

5. Sri Nararya di *nagara* Hring.

6. Sri Shabajaya di *nagara* Lwa.[[29]](#footnote-29)

Dari data-data di atas ternyata daerah Madura dan Lamajang (Lumajang) pada zaman Singasari telah muncul dengan status *nagara.* Dengan demikiankedua daerah itu merupakan wilayah penting dalam struktur pemerintahan Singasari. Peranan Madura dan Lamajang ternyata akan terus berkembang dan berperan penting dalam perjalanan sejarah Jawa Timur, baik pada masa Majapahit dan sesudahnya. Daerah Kediri selain mewarisi tradisi dari zaman keemasan kerajaan itu, juga terus berkembang hingga saat ini. Adapun *Glang-glang* yang terletak di selatan Madiun diduga kemudian menjadi embrio daerah dan kota Madiun, sedang *Hring* dan *Lwa* belum dapat diidentifikasi.

Prasasti Mula-Malurung dikeluarkan oleh Maharaja Seminingrat atau Wisnuwardhana pada tanggal 15 paro terang bulan Marggasira 1177 Saka bertepatan tanggal 28 Desember 1255.[[30]](#footnote-30)

**C. Masa Kerajaan Majapahit (1294-1527)**

Dari sumber prasasti Mula-Malurung yang telah menyebutkan istilah *nagara* memberikan petunjuk atau indikasi bahwa struktur pemerintahan Singhasari telah memiliki orientasi pewilayahan yang tidak hanya ditujukan kepada daerah-daerah kecil di pedalaman seperti *thani* dan *wisaya* atau *watek,* melainkan juga memperhatikan wilayah-wilayah besar atau propinsi yang pada abad XIII dinamakan *nagara.* Perubahan orientasi itudalam rangka perluasan kawasan politik, yaitu menghadapi perdagangan global pada abad XIII yang terus berkembang karena mengalami perpindahan rute. Perubahan rute itu disebabkan oleh runtuhnya Bagdad ke tangan Bangsa Mongol atau Tartar (1258) dan tidak amannya sepanjang “Jalur Sutera” *Silk Roads.* Jalurituterbentang di pedalaman Eropah-Asia, menghubungkan perdagangan antara “dunia” bagian barat dunia (Islam dan Eropah) dan dan bagian “timur”, yaitu Cina. Perdagangan melalui jalur darat menjadi tidak aman dari gangguan Bangsa Mongolyang pasca keruntuhan Bagdad (1258) menguasai sebagian besar jalur *Silk Roads* di daratan. Akibatnya, rute-rute perdagangan tersebut beralih ke jalur laut hingga menimbulkan *Silk Roads* di lautan secara berantai. Jalur itu di barat berujung di Genoa-Venesia di Italia, dan di timur berakhir di Maluku (di selatan) sebagai penyedia komoditi rempah-rempah dan Cina/Jepang (di utara) sebagai produsen sutera dan porselin. Kedua jenis komoditi itu sangat digemari di Dunia Arab dan Eropah.

Dalam konstelasi ini Kepulauan Indonesia berada pada posisi strategis yang sangat menguntungkan. Dalam posisi itu perairan Nusantara menjadi jalur pelayaran utama untuk menuju arah Eropa, Asia Timur, dan Maluku dan sebaliknya.[[31]](#footnote-31) Perkembangan tersebut merupakan kesempatan emas bagi Nusantara untuk merebut peluang dalam perdagangan internasional, seperti dicita-citakan oleh Pu Shendok, peletak dasar kekuasaan di Jawa Timur pada awal abad X. Kebijakan memadukan antara kedua potensi dengan berbagai sumberdayanya yang dipelopori oleh Pu Shendok, Darmawangsa, Wisnuwardhana, Kartanegara dan Raja-raja Majapahit, khususnya berkat peranan Gajah Mada. Keberhasilan pengintergrasian wilayah Nusantara tersebut ternyata telah memberikan landasan kokoh bagi perkembangan pemerintahan pada zaman berikutnya, hingga mampu mensinergikan seluruh potensi agraris dan maritim.Keberhasilan pengintergrasian wilayah Nusantara oleh Majapahit kemudian menempatkannya sebagai payung kekuasaan atas pemerintahan dan kepulauan Nusantara. Kerajaan ini oleh Muhammad Yamin disebut sebagai Perumahan Nasional Indonesia Pertama (I) yang mampu menempatkan seluruh suku bangsa dan Kepulauan Indonesia di bawah payung kekuasaan Majapahit dalam kurun waktu tidak kurang dari dua setengah abad (1294-1527).[[32]](#footnote-32)

Pada abad XIV sehubungan dengan intensitas dan efektivitas kehidupan sosial-politik Dinasti Majapahit sangat dinamis seperti dipaparkan, pemerintahannya telah menerapkan orientasi bersifat *outward looking* (berorientasi keluar) seperti dilaporkan di dalam *Nagarakrtagama.* Raja-raja Majapahit dalam memperkokoh kekuasaannya selain memperluas daerah juga memantapkan sistem penataan wilayah dan pemerintahan berlandaskan struktur yang telah ada kemudian disempurnakannya secara inovatif. Pada masa Majapahit diantaranya muncul jabatan-jabatan seperti : Dewan Kerajaan (*pahom nahendra*), Dewan Pertimbangan (*saptaprabu*)*,* pejabat kehakiman (*saptaupapati*), birokrasi (*panca tandha*), dan *darma putera,* dan pasukan kamanan khusus (*bhayangkari*)*.* Penataan tersebut sangat intensif, terutama di Jawa sebagai basisnya.

Dalam struktur politik yang berlaku di Majapahit, Raja memegang memegang pengawasan tertinggi atas kekuatan militer dan administrasinya. Dalam sistem yang berlaku di Majapahit, militer dan staf administrasi terdiri dari pengikut-pengikut peseorangan dan hidup dari sumber daya ekonominya sendiri. Meluasnya kekuasaan Raja menyebabkan dilakukannya desentralisasi kekuasaan pribadinya.Untuk itu Raja mengangkat para gubernur sebagai wakilnya di daerah-daerah. Dengan demikian gubernur-gubernur daerah (*adhipati*) adalah wakil tertinggi kekuasaan Raja di daerah. Dalam susunan masyarakat para gubernur itu merupakan kelompok terkemuka karena status dan juga karena hubungan genealogisnya dengan Raja yang memerintah.Tidak jarang mereka bahkan mendesak para penguasa atau pejabat tinggi kerajaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketaatan para pejabat tinggi kerajaan, mereka dikawinkan dengan puteri-puteri keluarga Raja, dan hubungan Raja dengan bawahannya dilakukan berdasarkan asas *clientship* atau *patron client relationship.* Artinya hubungan itu merupakan ikatan antara penguasa politik tertinggi (*patron-*pelindung) dan orang yang dikuasakan (*client-*yang dilindungi) guna menjalankan sebagian kekuasaan penguasa tertinggi. Berdasarkan perbandingan toponimi kota-kota kuna seperti Tuban, Giri, Surabaya dan Majapahit yang memiliki struktur seragam yaitu : keraton, alun-alun, tempat suci keagamaan (candi-masjid), pusat pemerintahan (*kepatihan*), pusat kegiatan ekonomi yaitu pasar, tampaknya ibu kota dengan bangunan keraton Majapahit sebagai intinya merupakan model atau miniatur dari *kotaraja-kotaraja* diberbagaiwilayah*.[[33]](#footnote-33)* Hubungan ini berlaku di seluruh aspek kehidupan baik di tingkat lokal (*wanua-watek*), regional (*nagara,* propinsi) dan pusat kerajaan.

Wilayah kerajaan Majapahit, khususnya di Jawa dibagi menjadi sejumlah propinsi yang membawai/mengontrol sejumlah penguasa lokal: bupati, akuwu, dan demang. Dari propinsi-propinsi itu Kahuripan (Janggala) dan Kadiri (Daha) sebagai daerah inti kerajaan merupakan propinsi terpenting. Alasannya adanya kenyataan dari pemberitaan pada zaman sebelumnya tentang pembagian Pulau Jawa yaitu Kahuripan menjadi dua wilayah (*moiety*) oleh Airlangga menjadi Janggala dan Daha. Pembagian itu lebih didasarkan kepada kepercayaan dibanding karena pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Dalam sistem pemerintahan Majapahit yang berasas` *patrimonial feodal* para anggota bangsawan tinggi (*members of principal*) ditugaskan sebagai gubernur atau *bathara, natha* di daerah-daerah besar*.* Th. G. Th. Pigeaud mengartikan *natha* atau *bathara* sebagai *protectors* (pelindung) suatu wilayah yang cukup besar yaitu ; *nagara* atau propinsi.Semua keluarga Kerajaan, termasuk yang menjadi gubernur atau *natha* di daerah-daerah memiliki kediaman di ibu kota kerajaan. Antara lain : *Bhre* *Wengker* dan *Bhre Matahun.* Mereka juga memiliki perangkat birokrasi seperti *patih,* pejabat pemungut pajak (*mangilala drwya haji*), pejabat pengadilan dan keagamaan (*upapati*).

Dimuka telah dipaparkan bahwa para penguasa lokal baik bupati maupun *natha, bathara, adhipati* sebagai gubernur menerima kekuasaan dari Raja namun ia harus melakukan kewajiban seperti menyediakan tenaga untuk keperluan Raja dan kepentingan militer bila diperlukan, membayar pajak, dan menghadap ke ibukota atau ke istana untuk menyatakan kesetiaan.

Di Majapahit tradisi menghadap dilakukan dua kali yaitu pada bulan Phalguna –Caitra (Februari-Maret) dan bulan Srawana-Badra (Agustus-September). Pelaksanaan tradisi menghadap dapat dianalogikan dengan Pekan Raya Tahunan (*Annual Festival*). *Annual Festival*  tahun 1365 seperti yang diberitakan oleh Prapanca dalam *Nagarakrtagama* dilakukan pada minggu III bulan Phalguna dan diakhiri pada minggu terakhir (IV) bulan Caitra juga dalam rangka peringatan hari lahir Hayam Wuruk (1333) ke-32 (4 windu)*.* Festival Tahunan1365 dirayakan secara besar-besaran, dan karenanya tidak mustahil apabila penulisan *Nagarakrtagama* yang telah lama dilakukan oleh Prapanca, karya itu memang diniatkan sebagai persembahan atau hadiah ulang tahun ke-32 sang Raja.[[34]](#footnote-34)

Sebagai kegiatan upacara yang diadakan setiap tahun Festival itu menurut pemberitaan *Nagarakrtagama* Pupuh LXXXVIII-XCI 1-9 prosesinya dimulai minggu ketiga bulan Phalguna dan ditutup pada akhir bulan Caitra. Acaranya terdiri dari (I) *Bhrisadi* dan persembahan makanan untuk para leluhur yang ditaruh di atas *ancak* bambu yang didirikan ditengah-tengah alun-alun. Acara ini disertai dengan ditabuhnya *bendhe* sebagai pemberitahuan tibanya *Annual Festival* selamatujuh hari. Prosesi *bhrisadi* dimulai tanggal 15-21 Phalguna 1287 S./ 26 Februari - 4 Maret 1365 M.

Prosesi selanjutnya adalah (II) kirab Raja dan keluarganya (22 Phalguna-1 Caitra 1287 S./5-11 Maret 1365). Acara kirab diakhiri dengan Pentahbisan (Persembahan kepada Raja) pada hari pertama (tanggal 1 Caitra 1287 S./11 Maret 1365). Acara *Bhrisadi* dan Kirab dapat dikatakan sebagai Upacara Pembukaan (*Opening Ceremony*), kemudian ditutup dengan (III) upacara Pentahbisan (Persembahan kepada Raja) pada hari terakhir.

Acara IV adalah Sidang Para Pembesar. Pigeaud menamakannya sebagai *Assembly of Mandarin* atau Sidang Pembesar (Pejabat Tinggi Kerajaan). Sidang ini tampaknya sebagai persiapan untuk Sidang Raya Kerajaan (bandingkan dengan *gladi* bersih). Dalam pertemuan para pejabat tinggi kerajaan tersebut dibacakan kitab *Ajar ing Raja Kapa-kapa,* dimulai pada tanggal 1 Caitra 1287 S. Bersamaan dengan diselenggarakannya Sidang Para Pembesar kerajaan juga dilakukan penyampaian upeti dan pertandingan olah raga antar kontingen dari daerah-daerah taklukan Majapahit. Acara Sidang Pembesar dan Pekan Olah Raga itu berlangsung selama 12 hari (1-12 Caitra 1287 S/11-22 Maret 1365), sedangkan acara (V) jamuan makan untuk para pembesar/pejabat pusat dan daerah diselenggarakan selama 4 hari (13-16 Caitra 1287/ 23-26 Maret 1365).

Sidang Kerajaan sebagai acara (VI) diselenggarakaan di bangunan memanjang di lapangan Bubat pada tanggal 17-24 Caitra 1287 S./27 Maret-3 April 1365 M. Acara terakhir (VII) Pesta Rakyat terdiri dari Malam Kesenian (Pasar Malam ?) dan Pesta Makan untuk rakyat (selamatan-kenduri) diselenggarakan di pada taanggal 25 Caitra-1 Waisaka 1287 S./4-11 April 1365.

Berdasarkan perbandingan dengan penyelenggaraan *Garebeg Maulud* pada zaman Mataram sidang ini bersifat sekuler antara lain hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, hubungan pusat-daerah, dan masalah-masalah sosial ekonomi. Kehadiran para penguasa lokal pada acara Sidang Kerajaan menjadi tolok ukur kesetiaan mereka kepada Maharaja. Sebaliknya ketidak munculan mereka tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan akan berakibat serius bagi hubungan mereka dengan Raja. Kasus ini telah menimpa Wiraraja (Lumajang), Wirabhumi (Blambangan) di zaman Majapahit, Ki Kebo Kenanga pada zaman Demak, Ki Ageng Mangir, Adipati Pregola (Pati), Tumenggung Jayengrana, Adipati Aria Jayapuspita (Surabaya), Cakraningrat IV (Madura), Tawang Alun (Blambangan) dari zaman Mataram.

Acara (VI) yaitu Sidang Kerajaan yang diselenggarakan pada tanggal 17-24 Caitra 1287 S./ 27 Maret - 3 April 1365 M. merupakan acara terpenting. Sidang ini dihadiri segenap keluarga Raja, wakil-wakil seluruh negeri, khususnya para gubernur atau *adhipati,* para pemilik *apanage*, dan para kepala daerah atau bupati. Bagaimana jalannya sidang ? *Nagarakrtagama* Pupuh LXXXVIII syair 1-5 dan Pupuh LXXXIX syair 1-9 melaporkan dengan rinci.

Sidang Kerajaan dengan acara utama pembinaan negara (*statecraft*), dipimpin oleh dua orang pejabat tinggi senior (*arya adhikara-ranadhikara*) menampilkan tiga nara sumber; *Natha* Wengker : Wijayarajasa, *Natha* Singasari (Kertawardhana), dan Maharaja Hayam Wuruk sendiri. Materi pembinaan yang diketengahkan oleh *Natha* Wengker tentang anjuran untuk meningkatkan kesetiaan kepada Raja, menyayangi rakyat dan bawahan, memajukan desa, memelihara jembatan, dan usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. *Natha* Singasari : Kertawardhana membahas masalah keamanan, mengawasi para penjahat, dan mencegah terjadinya pelanggaran susila agar rakyat terus meningkat kesejahteraannya.

Dalam Sidang Kerajaan tahun 1365 Hayam Wuruk sendiri menegaskan bahwa pintu Kerajaan terbuka bagi setiap *Rajakarya* (pedagang?). Dalam mekanisme pemerintahan Raja menegaskan bahwa undang-undang tentang pemerintahan yang telah ada sejak zaman Ibunda (Tribhuwanattunggadewi) harus ditaati. Hayam Wuruk menganalogikan hubungan antara *nagara* (propinsi) dan desa seperti singa dan hutan. Kata Hayam Wuruk, jika desa rusak *nagara* akan kekurangan makan, dan bila tidak ada tentara di *nagara* maka kerajaan akan mudah di serang, karena itu peliharalah keduanya. Demikian perintah Hayam Wuruk.[[35]](#footnote-35) Bukti ekologis diselenggarakannya upcara *sheba* secara besar-besaran di Majapahit terdapatnya depo-depo sampah dari zaman itu dan juga bekas-bekas tidak kurang dari 25 sumur di sekitar gapura Wringin Lawang. Dari depo-depo sampah tersebut didapati sisa-sisa tulang-tulang sapi, kerbau, kambing, babi dan tikus, gerabah, proselin, genting, kepeng Cina, dsbnya.[[36]](#footnote-36)

Dalam hubungannya dengan pembentukan dan pemerintahan *nagara* ataupropinsi setelah wilayah Majapahit menjadi sedemikian luas, Raja sebagai inkarnasi dewa (kultus dewaraja) dan pusat kosmis *jagad* raya dilambangkan sebagai singa yang berkomunikasi dan melindungi masyarakat secara langsung, lewat pancaran kekuatan kosmis-magisnya. Untuk itu diangkatlah para keluarga Raja menjadi *adhipati* atau gubernur pada *nagara*–*nagara* atau propinsi sebagai penghubung. Di Asia Tenggara hubungan itu digambarkan bersifat konsentris.[[37]](#footnote-37) Dengan demikian jarak antara Raja dan masyarakat desa yang diibaratkan bagai hubungan singa dan hutan tidak terputus. Dalam konteks itulah Hayam Wuruk mengukuhkan Undang-undang pemerintahan dari masa sebelumnya, termasuk tradisi dan struktur pemerintahan propinsi pada masa Singasari (1222-1292), yang telah diumumkan dalam prasasti Malurung (1255), dilanjutkan oleh Tribhuwanattunggadewi mendapat peneguhan pada Sidang Kerajaan 1365. Dengan demikian saat pengukuhan kembali Undang-undang pada Sidang Kerajaan yang dilaksanakan mulai **17** **Caitra** **1287 S.** bertepatan **tanggal** **27** **Maret** **1365 M.** dapat dianggap sebagai tanggal Harijadi pemerintahan *nagara* setingkat propinsi di Jawa Timur dalam struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit. Apalagi Hayam Wuruk juga telah melakukan perjalanan inspeksi ke wilayah-wilayah Majapahit di bagian timur.[[38]](#footnote-38) Dalam perkembangannya dikemudian hari daerah-daerah tersebut menjadi wilayah Propinsi *Bang Wetan* atau Jawa Timur

Apakah upacara menghadap tahunan itu efektif untuk menjamin kesetiaan para penguasa lokal? Contoh peristiwa di bawah ini akan menjelaskannya. Ketidakhadiran para pembesar dan pejabat dalam Sidang Kerajaan tanpa alasan yang tepat dianggap tindakan memberontak atau sebagai pelecehan kekuasaan Raja.[[39]](#footnote-39) Statemen *Nagarakrtagama* ini sesuai dengan pemberitaan *Serat Pararaton* yang menyatakan bahwa gubernur wilayah timur, Aria Wiraraja pada masa Jayanegara (1309-1328) karena merasa tidak cocok dengan Raja ia tidak lagi datang saat upacara yang diselenggarakan di Majapahit pada  *mangsa.* Dalam hal ini *Pararaton* mengatakan “..***...*** (*Sira Wiraraja tan amulih maring Majapahit, tan ayun angawolu”-* Adalah Wiraraja tidak mau lagi kembali ke Majapahit, (juga) tidak menghadap pada bulan ke delapan).[[40]](#footnote-40) Bulan atau *mangsa* kedelapan itu bertepatan dengan bulan *Phalguna*-*Caitra* dalam penanggalan Saka.[[41]](#footnote-41)

Dalam jaman Mataram peristiwa itu juga terjadi pada masa pemerintahan Pakubuwana I (1703-1719). Misalnya Jayengrana penguasa Surabaya di Sidang Kerajaan pada Upacara Garebeg Maulud tahun 1709 ia mengecam beban upeti Mataram maupun kewajiban para Bupati membayar hutang Mataram kepada VOCmenjadi beban rakyat yang sangat berat. Akibat sikap tersebut Covert Cnoll menekan Raja untuk menghabisi nyawanya pada *Garebeg* *Maulud* tahun berikutnya (1710).[[42]](#footnote-42) Keengganan menghadap ke Ibukota Kerajaan juga dilakukan Adipati Aria Jayapuspita (adik Jayengrana) sebelum ia melancarkan perlawanan terhadap Mataram dan VOC (1718-1722). Perang tersebut terekenal dengan sebutan Perang Surabaya.[[43]](#footnote-43)

Tradisi menghadap (*sheba*) ini telah dilakukan jauh pada masa-masa sebelum Majapahit dan dibakukan pada zaman kerajaan itu, terus berlangsung pada periode Mataram (Islam, 1576-1755). Untuk wilayah-wilayah di luar Jawa Timur dan Madura mereka diwakili oleh gubernur setempat (*adhipati*) dan patihnya, atau pejabat-pejabat pemerintahan lainnya yang dibantu para jaksa (*adhyaksa*) dan petugas-petugas pengadilan (hamba-hamba hukum-*wet*) : *upapati.* Jumlahpropinsi dan para gubernurnya di Jawa pada masa Hayam Wuruk (1950-1389) ada 12 seperti pada Tabel 1.

Dalam sistem politik Majapahit yang berasas *patrimonial feodal* di dalam wilayah Majapahit semua komunitas lokal, mulai dari tingkat *nagara /rajya* sampai tingkat ka-*buyut-*an padaumumnyabersifat otonom. Para *kawula* dan pejabatnya hanya wajib membayar pajak atau upeti, menyediakan tenaga kerja untuk Raja, keluarga dan stafnya, dan menyediakan pasukan bila diperlukan. Pimpinan politik disentralisasikan di tingkat Kerajaan (pusat), yang berakibat menciptakan stratifikasi sosial sesuai dengan kerangka pemerintahan. Struktur di bawahnya adalah *nagara* ataupropinsi oleh para *bathara* atau *bhre* yang tidak lain adalah bangsawan keluarga Raja. *Nagara-nagara* itu berdasar pemberitaan pupuh III-IX Kahuripan, Daha, Wengker, Singasari, Matahun, Lasem, Pajang, Mataram, Wirabhumi, Kabalan, Paguhan dan Pawanuhan.[[44]](#footnote-44) Dari wilayah propinsi-propinsi tersebut di antaranya ada yang masih dapat dilacak. Misalnya : Singasari, Daha, Wengker (Ponorogo), Matahun (Bojonegoro), Pajang, Wirabhumi (Blambangan), Mataram, dan Lasem. Adapun Kabalan, Paguhan dan Pawanuan belum dapat diketahui letaknya.

Ada tanggal lain yang juga berhubungan dengan masalah penetapan munculnya pemerintahan *nagara* atau propinsi selain penanggalan prasasti Mula-Malurung ialah tanggal peluncuran *Nagarakrtagama* itu sendiri yang menurut analisa H. Kern dalam *Verspreide Geschriften* (*KVG*) Jilid VIII dilakukan pada tanggal 25 September 1365.[[45]](#footnote-45)

Secara vertikal struktur pemerintahan Majapahit dengan padanan wilayah dan penguasa atau pejabatnya sebagai berikut.

Kabuyutan (dusun/dukuh/lingkungan/rama)

Thani/wanua (desa, petinggi)

Lurah/kuwu (kademangan/demang)[[46]](#footnote-46)

Watek/wisaya (kabupaten/tumenggung)

Rajya (nagara) (propinsi/raja/natha/bhatara/wadhana/adhipati)

Bhumi (pusat/maharaja).[[47]](#footnote-47)

Dalam struktur ini satuan-satuan wilayah besar yang muncul pada zaman Singasari menjadi format bagi pemerintahan setingkat propinsi tetap disebut *nagara.* Pada abad XIV berdasarkan pemberitaan *Nagarakrtagama* Pupuh III-IX berjumlah dua belas, yaitu : Kahuripan dan Daha (tengah-inti kerajaan), Singhasari, Wengker (Ponorogo), Matahun (Bojonegoro), Wirabhumi (Blambangan), Paguhan (?), Kabalan (?), Pawanuan (?) Lasem (utara), Mataram dan Pajang (barat).[[48]](#footnote-48) Adapun para *natha, bathara* atau gubernurnya seperti tercantum pada Tabel 1.

Jumlah satuan-satuan wilayah propinsi atau *nagara* tersebut pada abad berikutnya (XV) juga muncul lagi berdasarkan prasasti Suradakan (1447) yang dikeluarkan oleh Maharaja Dyah Wijayaparakramawardhana atau Dyah Kertawijaya pada tanggal 22 Nopember 1447. (// *swasti srisakawarsatita 1368, marggasiramasa, tithipancadasi suklapaksa, tu-u-bu-wara-kuranthil-*Selamat tahun Saka 1338,bulan Magasira, bertepatan tanggal 15 paro terang*//.[[49]](#footnote-49)* Wilayah propinsi Majapahit yang semula pada abad XIV berdasarkan pemberitaan *Nagarakrtagama* berjumlah dua belas berkembang menjadi empat belas. Masing-masing terdiri dari 7 propinsi lama (Daha, Wengker, Pajang, Mataram, Matahun, Wirabhumi); 7 propinsi baru (Tanjungpura, Kembang Jenar, Kabalan, Singapura, Jagaraga, Keling, dan Kalinggapura). Propinsi lama yang lenyap dari daftar ialah Lasem. Masing-masing satuan daerah itu dipimpin oleh seorang bangsawan keluarga raja (*members of principal*) sebagai Raja Muda bergelar *Bathara* atau gubernur tercantum pada Tabel 2*.*[[50]](#footnote-50)

Tabel 1

DAFTAR NAMA-NAMA *NAGARA* (WILAYAH PROPINSI)

BERDASARKAN PUPUH 6 DN 7 NAGARAKRTAGAMA (1365)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama *Nagara* | Nama *Natha* atau Gubernur | Keterangan |
| 1. | Kahuripan (lk. Janggala) | Tribhuwanatatunggadewi | Ibu Raja |
| 2. | Daha (Kadiri) | Rajadewi Maharajasa | Bibi/mertua |
| 3. | Singhasari | Kertawardhana | Ayah Raja |
| 4. | Wengker (Ponorogo) | Wijayarajasa | Paman/mertua |
| 5. | Matahun (Bojonegoro) | Rajasawardhana | Suami Bhre Lasem, sepupu Hy. Wuruk |
| 6. | Wirabhumi (Balambangan) | Nagarawardhani | Kemenakan Hy. Wuruk |
| 7. | Paguhan (?) | Singawardhana | Ipar Hayam Wuruk |
| 8. | Kabalan (?) | Kusumawardhani | Anak (prp) |
| 9. | Pawanuan (?) | Surawardhani | - |
| 10. | Lasem (di Jawa Tengah) | Rajasaduhita Indudewi | SepupuHayam Wuruk |
| 11. | Pajang (dekat Solo) | Rajasaduhitaiswari | Saudara prp. Hayam Wuruk |
| 12. | Mataram (Yogyakarta) | Wikramawardhana | Kemenakan/menantu Hayam Wuruk |

Sumber : Diolah berdasarkan sumber dari Th. G. Th. Pigeaud, *Java in The 14th. Century A Study in*

*Cultural History I Javanese Texts in Trancription* (The Hague : M. Nijhoff, 1960), halaman 5-6, dan J. Noorduyn, “Family relationship between the members of the royal house of Majapahit tefrred to in the text” Majapahit in the Fifteenth Century, dalam *Bijdragen tot de Taal -, Land – en Volkenkunde Deel 134*  (‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1978), hlm.208-274.

Tabel 2

DAFTAR *NAGARA* ATAU PROPINSI DI MAJAPAHIT ABAD XV

BERDASARKAN PRASASTI SURODAKAN (1447)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama *Nagara* | Nama *Natha* (Gubernur) |
| 1. | Kahuripan (lk. Janggala) | Rajasawadhana  Dyah Wijayakumara |
| 2. | Daha (Kediri) | Jayawardhani Dyah Iswara |
| 3. | Wengker (Ponorogo) | Girisawardhana  Dyah Suryawikrama |
| 4. | Tumapel (Singhasari) | Singawikramawardhana  Dyah Suraprabawa |
| 5. | Matahun (Bojonegoro) | Wijayaparakrama  Dyah Samarawijaya |
| 6. | Wirabhumi (Blambangan) | Rajasawardhana Indudewi  Dyah Pureswari |
| 7. | Jagaraga (br. daya Ngawi) | Wijayaindudewi  Dyah Wijayaduhita |
| 8. | Kling (timur Kadiri) | Girindrawardhana  Dyah Wijayakarana |
| 9. | Singapura (?) | Rajasawardhanadewi  Dyah Sripura |
| 10. | Kalinghapura (?) | Kamalawarnnadewi  Dyah Sudayitra |
| 11. | Kembang Jenar (?) | Rajanandeswari  DyahSudarmini |
| 12. | Kabalan (?) | Mahamahisi Dyah Sawitri |
| 13. | Pajang (dekat Solo) | Dyah Sura Iswari |
| 14. | Tanjungpura (?) | Mangalawardhani  Dyah Suragharini |

Sumber : H.M. Yamin, *Tatanegara Majapahit Sapta-Parwa II*

(Jakarta : Prajnaparamita, 1960), hlm. 182-212.

Meskipun secara politik pada awal abad XVI Majapahit telah runtuh, akan tetapi kehidupan sosial budayanya termasuk struktur pemerintahannya masih terus bertahan. Struktur pemerintahan tersebut pada zaman berikutnya yaitu Demak (1478 - 1546), dan Pajang (1546-1582) mengalami beberapa perubahan, karena ada daerah yang tenggelam dan ada pula daerah baru yang muncul. Perluasan wilayah Demak diberitakan dalam *Babad* *Sangkala*. Sumber dari *Babad* *Sangkala* dapat dibandingkan dan dilengkapi dengan sumber Portugis. Perluasan kerajaan ke arah timur dimulai dengan menguasai bandar penting Tuban (1527), Wirasari (1528, belum dapat diidentifikasi), Gagelang (Madiun sekarang, 1529). Satu tahun kemudian jatuh pula Medangkungan (1530, mengingatkan Medang Kamulan), Pasuruan (1535). Daerah-daerah di lembah Brantas : Blitar, Mojokerto (1541), dan Lamongan (1542). Gunung Penangungan, situs keramat Majapahit dapat dikuasai (1543). Daerah lain di lembah Sungai Brantas, Mamenang/Kediri dikuasai (1544), Sengguruh/Malang (1545). Tatkala Demak menaklukkan Ujung Timur Jawa sultannya : Trenggono tewas (1546).[[51]](#footnote-51)

**D. Penutup**

Peristiwa atau kejadian pada masa lampau dituliskan kembali agar masyarakat dapat mengetahui dan mengambil nilai-nilai dari peristiwa tersebut. Dinamika politik dan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur memberi pemahaman dan kesadaran berbagai kalangan, baik siswa, guru, dan peminat sejarah. Harapan ke depan bagi masyarakat Jawa Timur dapat member semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bekal untuk membangun Jawa Timur di kemudian hari. Terciptanya harmonisasi antar warga masyarakat setelah memahami perjalanan sejarah Jawa Timur memicu munculnya gerakan untuk lebih giat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan memahami sejarah agar mengenal siapa jati diri kita sebagai sebuah bangsa.  Dari belajar sejarah kita dapat mengingat kembali perjuangan para pendiri bangsa dalam membentuk pemerintahan dan akhirnya merebut kemerdekaan.

**Daftar Pustaka**

Agus Aris Munandar, *Beberapa Data Historis Dari Prasasti Mula-Malurung* (Jakarta : FS UI, 1984),

Aminuddin Kasdi, “Pisowanan Ageng Dalam Paradigma Budaya Majapahit”, dalam Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, *Sri Sultan Hamengkubuwana X Pisowanan Ageng : Sebuah Percakapan* (Yogyakarta : Yogya Forum, 2003).

Antoinette M. Barret Jones, *Early Tenth Century Java from The Inscriptions ; A Study of Aconomic, Soocial, and Administrative Conditions in The First Quarter of The Tenth Century (*Daprdrecht*-*Holland/Cinnaminson, 1984).

ARNAS RI Surakarta 1640-1890 No. Inv. 87. *Lyst der tans in wesen zijden Kinderen, Broederen en Susters mitsgaders Afkomst van den Soesoehoenang Pakoeboeana de Hoofd Regenten en Mindere Bediendens, dewelke haar aan het Hof en aan de stranden bevinden zoo mede aan de Binnenlanden, als.,* Cartaousoura October, Anno 1737*.*

B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies I* (Bandung : van Hove, 1955). Lihat : Aminuddin Kasdi, *Perlawanan Penguasa Madura Atas Hegemoni Jawa : Relasi Pusat-Daerah pada Periode Akhir Mataram* (*1726-1749*), (Yogyakarta : Jendela, 2003).

Badan Arsip Propinsi Jawa Timur, *Profil Gubernur Masa Hindia Belanda 1928-1942* (Surabaya : Badan Arsip Jawa Timur, 2003).

Boechari, “Rakryan Mahamantri i Hino, a study on the highest Court Dignitary of Ancient Java up to the 13th. Century A.D.” Publikasi Ilmiah 2 FSUI, 1975/1976.

Boechari, “The Inscription of Mula-Malurung. A new evidence on the history of Ken Angrok” dalam *Majalah Arkeologi III* (1-2) (Jakarta : Lembaga Arkeologi FS UI, 1980).

H. M. Yamin, *Tatanegara-Madjapahit Sapta-Parwa II* (Djakarta : Prapantja, 1962).

H.J. de Graaf, “SoerabajaindeXVIIEeuw*,* vanKoninkrijktotRegentschap - Surabaya dalam Abad XVII Dari Kerajaan Sampai Kabupaten”) dalam *Djawa,* 21 ste Jaargang, No. 3 Mei 1941.

J.G. de Casparis, “The Evolution of the Socio-Economic status of the East-Javanese village and its inhabitants” dalam Sartono Kartodirdjo, “ *Papers of The Fourth Indonesian-Dutch History Conference, Yogyakarta 24-29 Juli 1983* (Yogyakaarta : Gadjah Mada University Press, 1983).

J.G. de Casparis, *Airlangga Pidato Pengukuhan Dalam Djabatan Guru Besar Sedjarah Indonesia dan Bahasa Sanskrta di FKIP Universitas Airlanagga 1958* (Surabaya : Penerbitan Universitas, 1958).

J.J. Ras, *Babad Tanah Djawi De prozaversie van Ng. Kertapradja* (Dordrecht-Holland/Providence-USA : Foris Publications, 1987).

J.K.J. de Jonge, *De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie I-X* (‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff/Amsterdam : Frederik Muller, 1864). Lihat : J.E. Heeres, *Corpus* *Diplomaticum* *Neerlando Indicuum* (‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1934).

J.L.A. Brandes. “Oud-Javaansche Oorkonden Nagelaten Transcripties” *Verhandelingen van het Bataviaasch* *Genootschap* *van* *Kunsten* *en Wettenschappen Deel LX Eerste stuk*,(Batavia : Albrecht & Co., ’s-Hage/M. Nijhoff, 1913).

L.C. Damais, *Etudes D’epigraphie Indonesienne* (Paris : Ecole Francaise d’Extreme Orient, 1990).

M.C. Ricklefs, *War, Culture and Economy in Java, 1726-1749,Asian and EuropeanImperialism in the Early Kartasura Period*  (Sydney : Allen & Unwin, 1993).

Machi Suhadi, “Sedikit Tinjauan tentang Struktur Pemerintahan Zaman Sindok dan Zaman Majapahit”, dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi II 25-29 Februari 1980* (Jakarta : Proyek Penelitian Purbakala Jakarta Departemen P & K, 1982)

Machi Suhadi, *Tanah Sima Dalam Masyarakat Majapahit*  (Jakarta : Disertasi UI, 1993).

Nigel Bullough (Hadi Sidomulyo),*Menelusuri Jalur Perjalanan Raja Hayam Wuruk ke Lamajang Pada tahun 1251 S./1359 M.*(Surabaya : Ceramah di Jurusan Pendidikan Sejarah FIS-Unesa, 2004).

Pemerintah Kabupaten Pasuruhan & Pusat Penelitian Arkeologi Balai Arkeologi Yogyakarta, *Menelusuri Sejarah Asal-Mula Pasuruan Draft Laporan Akhir,* (Pasuruan : Tim Penelitian Harijadi Kabupaten Pasuruan, 2001).

R. Pitono, *Sedjarah* *Indonesia Lama* (Malang : Lembaga Penerbitan IKIP Malang, 1961) hlm. 195-196.

R.M. Ng. Porbatjaraka, *Riwajat Indonesia* *I* (Djakarta : Jajasan Pembangunan, 1952).

R.Ng. Poerbatjaraka, *Kapustakan Djawi* (Djakarta : Pembangunan, 1952).

Robert Heine Geldern, *Konsepsi Tentang Negara & Kedudukan Raja di Asia Tenggara* (Jakarta : Rajawali, 1972).

Robert van Niel, *A Survey of Historical Materials in Java and Manila* (Hawaii:University of Hawaii Press, 1970), hlm.40; J. Brandes, *Register of Proza Omzetting van Babad Tanah Djawi, VBG Deel LI* (Batavia; Albrecht & Co,/The Hague: Martinus Nijhoff, 1900).

S. Prawiroatmojo, *Bausastra Jawa-Indonesia* (Jakarta : Gunung Agung, 1985).

Slametmulyana, *Nagarakrtagama dan Tafsir Sejarahnya* (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1979).

Slametmulyana, *Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit* (Jakarta : Inti Idayu Press, 1983).

Soerooso M.P., “Masalah Air Bersih dan Sampah di Ibukota Majapahit, dalam Nurhadi Magetsari, Dkk., *Pertemuan Ilmiah Arkeologi V-II b Kajian Arkeologi Indonesia,* Jakarta, IAI, 1989.

Supratikno Rahardjo, *Peradaban Jawa*  *Dinamika Pranata Politik, Agama, dan Ekonomi Jawa Kuno* (Jakarta : Komunitas Bambu, 2000).

Team Penggali dan Perumus Hari Jadi Kab. Blitar, *Hari Jadi Kabupaten Blitar 5 Agustus 1324,* (Blitar : Team Penggali dan Perumus Hari Jadi Kab. Blitar, 1976 ).

Th. G. Th. Pigeaud, *Java in The 14th. Century A Study in Cultural History I-III Nagarakrtagama Text and Translations,* (The Hague, Martinus Nijhoff, 1960). Periksa juga Slametmuljana, *Nagarakrtagama dan Tafsir Sejarahnya,* ( Jakarta : Bhrathara, 1979).

Th. G. Th. Pigeaud, *Java in The 14th. Century III ….*

Th. S. Raffles, *The History of Java I* (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1978).

1. J.L.A. Brandes. “Oud-Javaansche Oorkonden Nagelaten Transcripties” *Verhandelingen van het Bataviaasch* *Genootschap* *van* *Kunsten* *en Wettenschappen Deel LX Eerste stuk*,(Batavia : Albrecht & Co., ’s-Hage/M. Nijhoff, 1913), hlm. 25-26. [↑](#footnote-ref-1)
2. Th. G. Th. Pigeaud, *Java in The 14th. Century A Study in Cultural History I-III Nagarakrtagama Text and Translations,* (The Hague, Martinus Nijhoff, 1960). Periksa juga Slametmuljana, *Nagarakrtagama dan Tafsir Sejarahnya,* ( Jakarta : Bhrathara, 1979). [↑](#footnote-ref-2)
3. B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies I* (Bandung : van Hove, 1955). Lihat : Aminuddin Kasdi, *Perlawanan Penguasa Madura Atas Hegemoni Jawa : Relasi Pusat-Daerah pada Periode Akhir Mataram* (*1726-1749*), (Yogyakarta : Jendela, 2003). [↑](#footnote-ref-3)
4. Robert van Niel, *A Survey of Historical Materials in Java and Manila* (Hawaii:University of Hawaii Press, 1970), hlm.40; J. Brandes, *Register of Proza Omzetting van Babad Tanah Djawi, VBG Deel LI* (Batavia; Albrecht & Co,/The Hague: Martinus Nijhoff, 1900), hlm.140-182. [↑](#footnote-ref-4)
5. J.K.J. de Jonge, *De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie I-X* (‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff/Amsterdam : Frederik Muller, 1864). Lihat : J.E. Heeres, *Corpus* *Diplomaticum* *Neerlando Indicuum* (‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1934). [↑](#footnote-ref-5)
6. Badan Arsip Propinsi Jawa Timur, *Profil Gubernur Masa Hindia Belanda 1928-1942* (Surabaya : Badan Arsip Jawa Timur, 2003), hlm. 1-3. [↑](#footnote-ref-6)
7. R.M. Ng. Porbatjaraka, *Riwajat Indonesia* *I* (Djakarta : Jajasan Pembangunan, 1952), hlm. 49-63. [↑](#footnote-ref-7)
8. Team Penggali dan Perumus Hari Jadi Kab. Blitar, *Hari Jadi Kabupaten Blitar 5 Agustus 1324,* (Blitar : Team Penggali dan Perumus Hari Jadi Kab. Blitar, 1976 ), hlm.18. Lihat juga ; J. Brandes, *Oud-Javaansch Oorkonden* (*OJO*) *… ,op.cit.,* hlm. 33-35. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pemerintah Kabupaten Pasuruhan & Pusat Penelitian Arkeologi Balai Arkeologi Yogyakarta, *Menelusuri Sejarah Asal-Mula Pasuruan Draft Laporan Akhir,* (Pasuruan : Tim Penelitian Harijadi Kabupaten Pasuruan, 2001), hlm. 54. Lihat J. Brandes, *OJO … ,op.cit.,*hlm. 72. [↑](#footnote-ref-9)
10. J. Brandes, *OJO … , Ibid.,* hlm. 84-89. [↑](#footnote-ref-10)
11. J.G. de Casparis, *Airlangga Pidato Pengukuhan Dalam Djabatan Guru Besar Sedjarah Indonesia dan Bahasa Sanskrta di FKIP Universitas Airlanagga 1958* (Surabaya : Penerbitan Universitas, 1958). [↑](#footnote-ref-11)
12. Th. G. Th. Pigeaud, *loc. cit.* [↑](#footnote-ref-12)
13. ARNAS RI Surakarta 1640-1890 No. Inv. 87. *Lyst der tans in wesen zijden Kinderen, Broederen en Susters mitsgaders Afkomst van den Soesoehoenang Pakoeboeana de Hoofd Regenten en Mindere Bediendens, dewelke haar aan het Hof en aan de stranden bevinden zoo mede aan de Binnenlanden, als.,* Cartaousoura October, Anno 1737*.* Lihat juga ; *Serat Babad Momana, loc. cit.*  [↑](#footnote-ref-13)
14. Th. S. Raffles, *The History of Java I* (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1978). [↑](#footnote-ref-14)
15. Supratikno Rahardjo, *Peradaban Jawa*  *Dinamika Pranata Politik, Agama, dan Ekonomi Jawa Kuno* (Jakarta : Komunitas Bambu, 2000), hlm. 386. [↑](#footnote-ref-15)
16. R. Pitono, *Sedjarah* *Indonesia Lama* (Malang : Lembaga Penerbitan IKIP Malang, 1961) hlm. 195-196. [↑](#footnote-ref-16)
17. R. Ng. Poerbatjaraka, *loc. cit*. [↑](#footnote-ref-17)
18. Antoinette M. Barret Jones, *Early Tenth Century Java from The Inscriptions ; A Study of Aconomic, Soocial, and Administrative Conditions in The First Quarter of The Tenth Century (*Daprdrecht*-*Holland/Cinnaminson, 1984), hlm.59-88.Lihat J.G. de Casparis, “Evolution ... , *loc. cit.* [↑](#footnote-ref-18)
19. Boechari, “Rakryan Mahamantri i Hino, a study on the highest Court Dignitary of Ancient Java up to the 13th. Century A.D.” Publikasi Ilmiah 2 FSUI, 1975/1976, hlm. 61-111. [↑](#footnote-ref-19)
20. J. Brandes, OJO ..., *op. cit.,* hlm. 69-106. Pu Shendok menggunakan gelar *katrini* antara lain : Sri Maharaja Rake Hino Pu Shendok Sri Isanawikramadharmattunggadewa (prs. Lawajati, 851 S.-929 M. ); Sri Maharaja Rake Halu Pu Shendok Sri Isanawikramadharmattunggadewa (pras. Singasari, 851 S.- 929 M.) [↑](#footnote-ref-20)
21. Untuk memperingati kemenangannya, Pu Shendok membangun *Jayastambha* (tugu kemenangan) dan *Jaya Amrta* (air kemenangan). Lihat J. Brandes, OJO ..., *op. cit .,* hlm.84-89. [↑](#footnote-ref-21)
22. Machi Suhadi, “Sedikit Tinjauan tentang Struktur Pemerintahan Zaman Sindok dan Zaman Majapahit”, dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi II 25-29 Februari 1980* (Jakarta : Proyek Penelitian Purbakala Jakarta Departemen P & K, 1982), hlm.295-332. [↑](#footnote-ref-22)
23. R.Ng. Poerbatjaraka, *Kapustakan Djawi* (Djakarta : Pembangunan, 1952). [↑](#footnote-ref-23)
24. J.G. de Casparis, *loc. cit.* [↑](#footnote-ref-24)
25. R. Ng. Poerbatjaraka,  *loc*. *cit .* [↑](#footnote-ref-25)
26. J. Brandes, OJO ..., *op. cit .,* hlm.164-168. Lihat : Machi Suhadi, Sima ..., *op. cit .,* hlm.101-102. [↑](#footnote-ref-26)
27. J. G. de Casparis, “ The evolution of socio-economic status of the East-Javanevense village and its inhabitants”, dalam Sartono Kartodirdjo, *Papers of The Fourth Indonesian – Dutch History Conference Yogyakarta 24-29 july 1983 Volume One : Agrarian History* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1986), hlm. 14. [↑](#footnote-ref-27)
28. Machi Suhadi, *Tanah Sima Dalam Masyarakat Majapahit*  (Jakarta : Disertasi UI, 1993), hlm. 100-110. [↑](#footnote-ref-28)
29. Boechari, “The Inscription of Mula-Malurung. A new evidence on the history of Ken Angrok” dalam *Majalah Arkeologi III* (1-2) (Jakarta : Lembaga Arkeologi FS UI, 1980), hlm. 55-70. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.* Lihat : Agus Aris Munandar, *Beberapa Data Historis Dari Prasasti Mula-Malurung* (Jakarta : FS UI, 1984), halaman 21-22. [↑](#footnote-ref-30)
31. Sebelum Columbus menemukan jalan ke Amerika (1492) dan Magelhaenes berhasil mengelilingi dunia (1522) Maluku dan Jepang merupakan kawasan dunia yang paling timur. [↑](#footnote-ref-31)
32. Slametmulyana, *Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit* (Jakarta : Inti Idayu Press, 1983). [↑](#footnote-ref-32)
33. H.J. de Graaf, “SoerabajaindeXVIIEeuw*,* vanKoninkrijktotRegentschap - Surabaya dalam Abad XVII Dari Kerajaan Sampai Kabupaten”) dalam *Djawa,* 21 ste Jaargang, No. 3 Mei 1941, hlm. 199-225. [↑](#footnote-ref-33)
34. Aminuddin Kasdi, “Pisowanan Ageng Dalam Paradigma Budaya Majapahit”, dalam Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, *Sri Sultan Hamengkubuwana X Pisowanan Ageng : Sebuah Percakapan* (Yogyakarta : Yogya Forum, 2003), halaman 336-348. [↑](#footnote-ref-34)
35. Slametmulyana, Nagarakrtagama ... , *op. cit .,* hlm. 318. [↑](#footnote-ref-35)
36. Soerooso M.P., “Masalah Air Bersih dan Sampah di Ibukota Majapahit, dalam Nurhadi Magetsari, Dkk., *Pertemuan Ilmiah Arkeologi V-II b Kajian Arkeologi Indonesia,* Jakarta, IAI, 1989, hlm. 137-153. [↑](#footnote-ref-36)
37. Robert Heine Geldern, *Konsepsi Tentang Negara & Kedudukan Raja di Asia Tenggara* (Jakarta : Rajawali, 1972), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-37)
38. Th. G. Th. Pigeaud, Java ..., *op. cit .,* hlm. 40-116. Nigel Bullough (Hadi Sidomulyo),*Menelusuri Jalur Perjalanan Raja Hayam Wuruk ke Lamajang Pada tahun 1251 S./1359 M.*(Surabaya : Ceramah di Jurusan Pendidikan Sejarah FIS-Unesa, 2004). [↑](#footnote-ref-38)
39. Slametmulyana, *Nagarakrtagama* ..., *op. cit .,*hlm.317-318. Lihat : Th. G. Th. Pigeaud, Java IV ..., *op. cit .,* hlm. 296-300. [↑](#footnote-ref-39)
40. J. Brandes, Pararaton ..., *loc. cit.*  [↑](#footnote-ref-40)
41. S. Prawiroatmojo, *Bausastra Jawa-Indonesia* (Jakarta : Gunung Agung, 1985), hlm. 333. [↑](#footnote-ref-41)
42. M.C. Ricklefs, *War, Culture and Economy in Java, 1726-1749,Asian and EuropeanImperialism in the Early Kartasura Period*  (Sydney : Allen & Unwin, 1993). [↑](#footnote-ref-42)
43. J.J. Ras, *Babad Tanah Djawi De prozaversie van Ng. Kertapradja* (Dordrecht-Holland/Providence-USA : Foris Publications, 1987), hlm.301-329. Kasus serupa juga terjadi pada masa Pakubuwana II (1726-1749), saat itu Adipati Cakraningrat IV dari Madura pada tahun 1723 sebagai isyarat perlawanannya terhadap Sunan. [↑](#footnote-ref-43)
44. Slametmulyana, *Nagarakrtagama dan Tafsir Sejarahnya* (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1979), hlm. 275-278. [↑](#footnote-ref-44)
45. C.L. Damais, Etudes ..., *op. cit .,* hlm. 682. [↑](#footnote-ref-45)
46. Dalam hal ini J. G. de Casparis menyatakan bahwa jabatan Kuwu dapat dibandingkan dengan jabatan Wedana atau Pembantu Bupati pada periode Hindia Belanda dan Kemerdekaan RI sampai tahun 1970-an. [↑](#footnote-ref-46)
47. J.G. de Casparis, “The Evolution of the Socio-Economic status of the East-Javanese village and its inhabitants” dalam Sartono Kartodirdjo, “ *Papers of The Fourth Indonesian-Dutch History Conference, Yogyakarta 24-29 Juli 1983* (Yogyakaarta : Gadjah Mada University Press, 1983), hlm.3-24. [↑](#footnote-ref-47)
48. Th. G. Th. Pigeaud, *Java in The 14th. Century III …. ,* hlm. 4-8. [↑](#footnote-ref-48)
49. L.C. Damais, *Etudes D’epigraphie Indonesienne* (Paris : Ecole Francaise d’Extreme Orient, 1990), hlm. 1455. [↑](#footnote-ref-49)
50. H. M. Yamin, *Tatanegara-Madjapahit Sapta-Parwa II* (Djakarta : Prapantja, 1962), hlm. 181-212. [↑](#footnote-ref-50)
51. De Graaf dan Pigeaud, *Kerajaan Islam pertama di Jawa. Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*(Jakarta*:* Grafiti, 2001) hlm. 64-65. [↑](#footnote-ref-51)